

Konstruksi Kinerja 100 Hari Pertama Pemerintah Daerah: Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar di Kota Bengkulu

Abdul Aziz Zulhakim¹, Suratman², Yorry Hardayani³, Jatmiko Yogopriyatno⁴

¹²³⁴Jurusan Administrasi Publik, Universitas Bengkulu

Dikirimkan: 14 Juli 2025

Direvisi: 25 Juli 2025

Diterbitkan: 30 September 2025

INTISARI

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi pasar sebagai instrumen konstruksi kinerja pemerintah daerah dalam periode 100 hari pertama kepemimpinan Walikota-Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi-Ronny PL. Tobing. Artikel ini memiliki kepentingan strategis dalam mengisi kesenjangan literatur yang belum mengaitkan implementasi kebijakan sektoral dengan konstruksi kinerja pemerintah dalam konteks temporal kritis “periode 100 hari pertama kepemimpinan Walikota terpilih”. Keunikan penelitian terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan teori konstruksi kinerja administrasi publik dengan analisis implementasi kebijakan dalam momentum legitimasi pemerintahan baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa konstruksi kinerja terwujud melalui integrasi tujuh dimensi strategis yang mencakup aspek politik-komunikatif, teknis-operasional, koordinatif-administratif, adaptif-responsif, intensif-disinsentif, temporal-strategis dan ekonomi-sosial. Konfigurasi aktor heterogen yang melibatkan pemerintah daerah, pedagang kaki lima, asosiasi pedagang, dan stakeholder lainnya memerlukan manajemen koalisi yang *sofistikasi* melalui pendekatan *Mendelow's Power-Interest Matrix*. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target awal berkontribusi pada pembentukan legitimasi berbasis kinerja, namun menciptakan tantangan keberlanjutan akibat ekspektasi publik yang meningkat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memahami fungsi program sektoral sebagai instrumen pembentukan legitimasi pemerintah daerah serta merekomendasikan pengembangan model konstruksi kinerja yang menyeimbangkan pencapaian jangka pendek dengan dampak transformasi berkelanjutan.

KATA KUNCI

Konstruksi kinerja; implementasi kebijakan; revitalisasi pasar; legitimasi pemerintahan; stakeholder

Korespodensi:

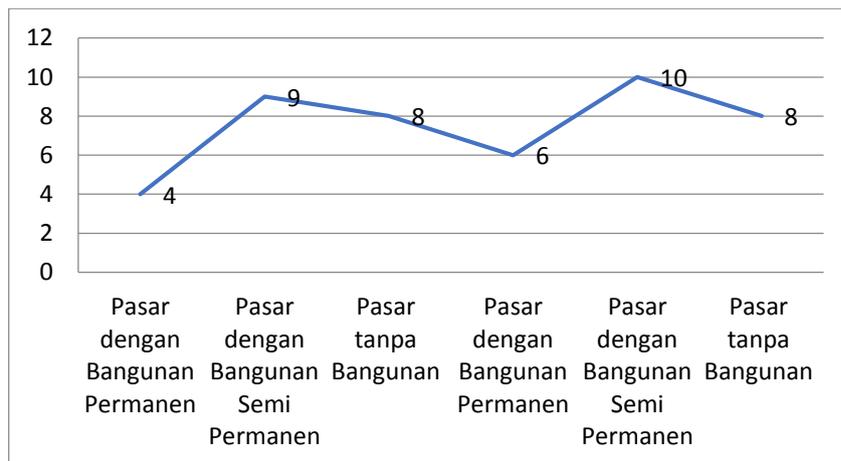
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu, Bengkulu 38371
Email: abdul.azizzulhakim@unib.ac.id

PENDAHULUAN

Periode 100 hari pertama kepemimpinan dalam konteks pemerintahan demokratis telah menjadi momentum kritis yang menentukan legitimasi dan kredibilitas pemerintahan baru. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada level nasional, tetapi juga memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan Walikota Bengkulu periode 2024-2029 yang dipimpin oleh Dedy Wahyudi dan Ronny PL. Tobing menghadapi tantangan untuk mentransformasikan janji-janji kampanye menjadi implementasi kebijakan konkret, khususnya dalam program “Penataan dan Pembangunan Pasar yang Bersih, Nyaman dan Modern” (Herdianson, 2025). Dalam konteks ini, revitalisasi pasar tradisional menjadi instrumen strategis untuk membangun konstruksi kinerja pemerintahan yang tidak hanya menekankan aspek teknis implementasi, tetapi juga dimensi simbolik dan komunikatif dalam pembentukan persepsi publik tentang efektivitas pemerintahan.

Kondisi empiris menunjukkan bahwa pasar tradisional di Kota Bengkulu menghadapi berbagai permasalahan infrastruktur yang memerlukan penanganan segera. Program revitalisasi empat pasar utama yaitu Pasar Panorama, Pasar Minggu, Pasar Barukoto I, dan Pasar Barukoto II merefleksikan realitas kerusakan yang meliputi sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, ketidaktertiban area parkir, kondisi atap yang mengalami kebocoran, keterbatasan fasilitas perdagangan berupa meja pedagang, serta sistem penerangan yang belum memadai. Kondisi Pasar Barukoto II yang mengalami kerusakan cukup parah menjadi representasi konkret dari urgensi implementasi program revitalisasi (Mayasari, 2025). Data BPS Tahun 2022 yang divisualisasi dalam Grafik 1, memperhatikan distribusi jumlah dan jenis pasar di Kota Bengkulu yang mengindikasikan perlunya investasi infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan.

Grafik 1. Jumlah dan Jenis Pasar di Kota Bengkulu



Sumber: (BPS, 2022)

Permasalahan teknis tersebut semakin kompleks dengan dinamika sosial-ekonomi pedagang, khususnya pedagang kaki lima yang memerlukan strategi

relokasi yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan mata pencaharian mereka. Heterogenitas kepentingan stakeholder yang terlibat dalam proses revitalisasi menciptakan tantangan implementasi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknokratis. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi implementasi yang mengintegrasikan aspek teknis dengan pendekatan partisipatif dan komunikatif yang efektif.

Sementara itu, idealnya periode 100 hari pertama kepemimpinan kepala daerah seharusnya mampu menjadi momentum pembentukan legitimasi melalui implementasi program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Konstruksi kinerja pemerintah dalam konteks revitalisasi pasar seharusnya tidak hanya terfokus pada pencapaian target fisik, tetapi juga pada proses pembentukan persepsi publik tentang efektivitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Program revitalisasi yang ideal mestinya mampu mengintegrasikan modernisasi infrastruktur dengan penguatan ekonomi lokal, sekaligus membangun model *governance* yang partisipatif dan berkelanjutan.

Pendekatan implementasi yang dipilih pemerintahan Dedy Wahyudi-Ronny PL. Tobing menunjukkan karakteristik konstruksi kinerja yang menekankan aspek persuasif dan partisipatif. Wakil Walikota Ronny PL. Tobing menegaskan “pentingnya pendekatan bertahap yang dimulai dengan dialog persuasif kepada pedagang, khususnya Pedakang Kaki Lima yang perlu direlokasi, sebelum melakukan tindakan penertiban melalui Satuan Polisi Pamong Praja” (Saputra, 2025). Strategi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun legitimasi melalui proses implementasi yang mempertimbangkan kepentingan stakeholder, sekaligus mempertahankan otoritas dalam penegakan peraturan daerah. Namun demikian, kompleksitas implementasi yang melibatkan heterogenitas aktor dengan kepentingan yang tidak selalu konvergen menimbulkan tantangan tersendiri dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Kajian literatur menunjukkan bahwa studi-studi terdahulu mengenai periode 100 hari pertama pemerintahan telah mengeksplorasi berbagai aspek, mulai dari dimensi simbolik hingga substansial dari kebijakan yang diimplementasikan. (Hood & Dixon, 2015) dalam analisisnya terhadap tradisi 100 hari di berbagai negara demokratis menekankan bahwa periode ini berfungsi sebagai “*honeymoon period*” yang memberikan ruang bagi pemerintahan baru untuk membangun momentum dan legitimasi. Sementara itu, (Poguntke & Webb, 2005) menjelaskan bahwa konstruksi kinerja dalam periode awal kepemimpinan sangat bergantung pada kemampuan pemerintahan dalam mengkomunikasikan pencapaian mereka kepada publik.

Dalam konteks Indonesia, beberapa studi telah mengkaji fenomena serupa pada level nasional. (Mietzner, 2020) menganalisis periode 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Ma’aruf dengan fokus pada strategi komunikasi politik dan pembentukan citra. Tulisan (Aspinall & Berenschot, 2019) dalam bukunya “*Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*” memberikan perspektif tentang bagaimana pemerintahan lokal di Indonesia menggunakan program-program populis untuk membangun legitimasi dalam periode awal kepemimpinan. Kajian tentang konstruksi kinerja pemerintahan daerah dapat

diidentifikasi melalui pola-pola komunikasi politik kepala daerah dalam membangun persepsi publik tentang keberhasilan mereka (Hutapea, 2020).

Revitalisasi pasar tradisional sebagai objek kajian juga telah menarik perhatian peneliti. Studi yang dilakukan (Engkus, 2020; Rohmadani & Megawati, 2022) menjelaskan bahwa revitalisasi pasar tradisional di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern dan meningkatkan peran ekonominya. Penelitian (Ranjani et al., 2018) melihat implementasi kebijakan revitalisasi biasanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi sering kali kurang menyentuh aspek manajemen, ekonomi dan sosial. Dalam penelitian yang sama (Ranjani et al., 2018) menjelaskan bahwa revitalisasi yang berhasil adalah yang mampu mengintegrasikan modernisasi fisik dan non fisik.

Kondisi pasar di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan tantangan implementasi yang beragam. Kondisi pasar di Kabupaten Mandailing Natal, misalnya, masih jauh dari standar ideal pasca kebakaran, dengan lingkungan yang becek, lapak yang semrawut, dan sebagian pedagang menggunakan badan jalan untuk berdagang, sehingga menyebabkan kemacetan (Novian et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi belum menyentuh aspek pengaturan ruang dan kepatuhan pedagang terhadap tata kelola pasar. Tantangan lainnya dalam implementasi kebijakan adalah terkait pemantauan dan pengawasan yang tidak memadai (Rohmadani & Megawati, 2022). (Indrawan et al., 2024) menegaskan bahwa revitalisasi yang efektif, seharusnya mampu mengubah persepsi negatif terhadap pasar tradisional, menjadikannya lebih menarik bagi pembeli. Keberhasilan ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk konten kebijakan dan konteks implementasi (Engkus, 2020).

Kesenjangan yang teridentifikasi dari penelitian-penelitian terdahulu terletak pada keterbatasan analisis yang mengintegrasikan dimensi konstruksi kinerja pemerintahan dengan implementasi kebijakan sektoral dalam konteks temporal yang spesifik. Sebagian besar studi tentang periode 100 hari pertama pemerintahan fokus pada aspek makro dan simbolik, sementara kajian tentang revitalisasi pasar tradisional cenderung mengabaikan dimensi politik dan konstruksi kinerja. Penelitian-penelitian sebelumnya belum mengaitkan implementasi revitalisasi pasar dengan konstruksi kinerja pemerintahan dalam periode kritis 100 hari pertama, sehingga pemahaman tentang bagaimana program sektoral dapat berfungsi sebagai instrumen pembentukan legitimasi pemerintahan daerah masih terbatas.

Berdasarkan kondisi empiris dan kesenjangan teoritis yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian utama: “Bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional dalam periode 100 hari pertama berfungsi sebagai instrumen konstruksi kinerja pemerintahan daerah di Kota Bengkulu?”. Pertanyaan ini dirinci ke dalam tiga sub-pertanyaan penelitian yang lebih operasional. Pertama, bagaimana strategi implementasi kebijakan revitalisasi pasar yang mengintegrasikan pendekatan teknis dan simbolik dalam periode 100 hari pertama pemerintahan Walikota Bengkulu? Kedua, bagaimana konfigurasi aktor dan dinamika koalisi multi-stakeholder mempengaruhi proses konstruksi kinerja dalam implementasi revitalisasi pasar? Ketiga, apa implikasi konstruksi kinerja melalui

program revitalisasi pasar terhadap legitimasi dan keberlanjutan program pemerintahan daerah di Kota Bengkulu?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi pasar dalam periode 100 hari pertama berfungsi sebagai instrumen konstruksi kinerja pemerintahan daerah di Kota Bengkulu. Penelitian ini secara khusus menekankan pada tiga dimensi utama, yaitu strategi implementasi kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan teknis dan simbolik, konfigurasi aktor dan dinamika koalisi multi-stakeholder dalam proses implementasi, serta implikasi konstruksi kinerja terhadap legitimasi dan keberlanjutan program pemerintahan daerah.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan teori konstruksi kinerja dalam administrasi publik dengan analisis implementasi kebijakan dalam konteks temporal kritis. Fenomena konstruksi kinerja dalam administrasi publik, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh (Hood, 2006), mengacu pada proses bagaimana pemerintahan membentuk, mengkomunikasikan dan melegitimasi capaian mereka melalui program-program kebijakan. Konstruksi ini tidak hanya melibatkan aspek teknis implementasi tetapi juga dimensi simbolik dan komunikatif yang membentuk persepsi publik tentang efektivitas pemerintahan. Dalam konteks Kota Bengkulu, konstruksi kinerja ini termanifestasi melalui pemilihan program revitalisasi pasar sebagai prioritas utama, penetapan target waktu yang ambisius, dan strategi komunikasi yang menekankan aspek partisipatif dalam implementasi.

Kerangka teoritis penelitian ini dibangun dengan mengintegrasikan tiga pendekatan utama. Pertama, teori konstruksi kinerja (*performance construction*) yang dikembangkan oleh (Bevan & Hood, 2006; Hood, 2006) untuk memahami bagaimana organisasi publik membangun narasi keberhasilan melalui seleksi indikator, presentasi data dan strategi komunikasi. Kedua, teori implementasi kebijakan yang mengacu pada model (Mubarok et al., 2020; Sabatier & Mazmanian, 1980) yang menekankan pentingnya kondisi sosio-ekonomi, dukungan politik, dan kapasitas implementasi dalam menentukan keberhasilan program kebijakan. Ketiga, konsep legitimasi pemerintahan dari (Dwiputrianti, 2009; Fahmy, 2022; Weber et al., 1978) yang membedakan antara legitimasi legal-rasional, tradisional, dan karismatik, yang relevan untuk memahami bagaimana periode 100 hari pertama berfungsi sebagai momentum pembentukan legitimasi.

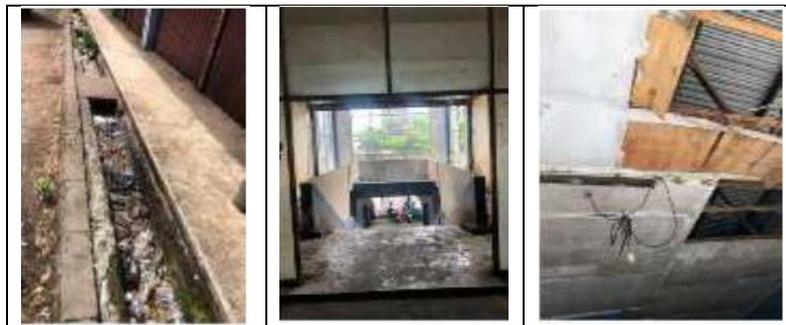
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi pasar di Kota Bengkulu selama periode 100 hari pertama pemerintahan Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi-Ronny PL. Tobing. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan stakeholder kunci yang meliputi Kepala UTPD Pasar, Satpol PP, asosiasi pedagang pasar, pedagang pasar, dan tokoh masyarakat, serta dikuatkan pula dengan data hasil observasi. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, pemberitaan media dan dokumentasi lapangan. Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan. Periode penelitian dilakukan selama enam bulan setelah berakhirnya periode 100 hari pertama untuk memungkinkan evaluasi retrospektif terhadap konstruksi kinerja yang telah terbentuk dan dampaknya terhadap persepsi publik tentang efektivitas pemerintahan.

PEMBAHASAN

A. Strategi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar sebagai Instrumen Konstruksi Kinerja

Implementasi kebijakan revitalisasi pasar dalam periode 100 hari pertama pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi-Ronny PL. Tobing, merespon kondisi empiris yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan, empat pasar utama yaitu Pasar Panorama, Pasar Minggu, Pasar Barukoto I, dan Pasar Barukoto II menghadapi berbagai permasalahan infrastruktur yang mencakup sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, ketidaktertiban area parkir, kondisi atap yang mengalami kebocoran, keterbatasan fasilitas perdagangan berupa meja pedagang, serta sistem penerangan yang belum memadai. Kondisi Pasar Barukoto II yang mengalami kerusakan cukup parah menjadi representasi konkret dari urgensi implementasi program revitalisasi yang telah diuraikan sebelumnya.

Gambar 1. Kondisi Pasar Barukoto II



Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2025

Pemilihan program revitalisasi pasar sebagai prioritas utama dari lima belas program unggulan di awal kepemimpinan mencerminkan upaya pemerintahan untuk mentransformasikan janji-janji kampanye menjadi implementasi kebijakan konkret, khususnya dalam program “Penataan dan Pembangunan Pasar yang Bersih, Nyaman dan Modern” yang telah menjadi komitmen politik mereka. Strategi ini sejalan dengan argumentasi di awal bahwa revitalisasi pasar tradisional menjadi instrumen strategi untuk membangun konstruksi kinerja pemerintahan yang tidak hanya menekankan aspek teknis implementasi, tetapi juga dimensi simbolik dan komunikatif dalam pembentukan persepsi publik tentang efektivitas pemerintahan.

Analisis strategi implementasi mengungkapkan bahwa pendekatan yang diadopsi pemerintahan tidak terbatas pada dialog dan persuasi semata, melainkan mencakup kerangka kerja komprehensif yang merespon kompleksitas permasalahan yang diidentifikasi.

1. Dimensi Politik-Komunikatif

Hal ini diwujudkan melalui pendekatan bertahap yang dimulai dengan dialog persuasif kepada pedagang, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang perlu direlokasi. Pendekatan ini merespon tantangan heterogenitas kepentingan stakeholder yang terlibat dalam proses revitalisasi. Wakil Walikota Ronny PL.

Tobing secara eksplisit menekankan pentingnya tahapan dialog sebelum melakukan tindakan penertiban melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang menunjukkan kesadaran akan kompleksitas sosial-ekonomi pedagang yang memerlukan strategi relokasi dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan mata pencaharian mereka.

2. **Dimensi Teknis-Operasional**

Dimensi ini secara langsung merespon kondisi empiris yang telah diuraikan sebelumnya, dimana perbaikan pada infrastruktur dasar meliputi sistem drainase, penataan area parkir, renovasi atap yang mengalami kerusakan, penyediaan fasilitas meja untuk pedagang, dan pemasangan sistem penerangan yang memadai. Prioritas pada Pasar Barukoto II yang mengalami kerusakan cukup parah mencerminkan strategi konstruksi kinerja yang mengutamakan dampak *visible* yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendekatan ini menjawab tantangan implementasi yang tidak diselesaikan hanya melalui pendekatan teknokratis sebagaimana telah diidentifikasi dalam analisis empiris.

3. **Dimensi Koordinatif-Administratif**

Dimensi ini mengintegrasikan berbagai stakeholder, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Pasar, Satuan Polisi Pamong Praja, Asosiasi Pedagang, PKL maupun pedagang yang memiliki kios di pasar. Kompleksitas koordinasi merespon tantangan implementasi yang melibatkan heterogenitas aktor dengan kepentingan yang tidak selalu konvergen. Sedangkan proses koordinasi yang intensif namun tidak selalu tanpa hambatan mencerminkan realitas implementasi yang menuntut pemerintahan daerah untuk mengembangkan strategi yang mengintegrasikan aspek teknis dengan pendekatan partisipatif dan komunikatif yang efektif.

4. **Dimensi Adaptif-Responsif**

Dimensi ini memungkinkan menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi lapangan dan respon stakeholder. Fleksibilitas dalam menghadapi resistensi atau perubahan situasi sambil mempertahankan target utama program mencerminkan pemahaman bahwa konstruksi kinerja pemerintahan dalam konteks revitalisasi pasar tidak dapat terfokus hanya pada pencapaian target fisik, tetapi juga pada proses pembentukan persepsi publik tentang efektivitas dan responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat.

5. **Dimensi Insentif-Disinsentif**

Dimensi ini mengkombinasikan pendekatan persuasif dengan mekanisme penegakan aturan melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai langkah terakhir. Strategi ini merespon karakteristik konstruksi kinerja yang menekankan aspek persuasif dan partisipatif sambil mempertahankan otoritas dalam penegakan peraturan daerah. Kombinasi antara pendekatan lunak (*soft*) dan keras (*hard*) ini mencerminkan upaya pemerintahan untuk membangun legitimasi melalui proses implementasi yang mempertimbangkan kepentingan stakeholder, sekaligus mengatasi tantangan implementasi yang melibatkan heterogenitas aktor dengan kepentingan yang tidak selalu konvergen.

6. **Dimensi Temporal-Strategis**

Dimensi ini mempertimbangkan penetapan target 100 hari bukan hanya sebagai *timeline* teknis, tetapi sebagai instrumen komunikasi politik yang menciptakan ekspektasi publik dan mengukur komitmen pemerintahan baru. Kerangka waktu yang terbatas ini memaksa semua pihak untuk fokus pada pencapaian yang terukur dan *visible*, sekaligus merespon kebutuhan periode 100 hari pertama kepemimpinan sebagai momentum kritis yang menentukan legitimasi dan kredibilitas pemerintahan baru.

7. Dimensi Ekonomi-Sosial

Dimensi ini mempertimbangkan dampak revitalisasi terhadap keberlangsungan usaha pedagang dan dinamika ekonomi lokal. Strategi implementasi dirancang untuk meminimalkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi sambil mencapai target modernisasi infrastruktur, yang merespon dinamika sosial-ekonomi pedagang yang memerlukan strategi relokasi dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan mata pencaharian mereka sebagaimana fakta empiris yang telah dianalisis sebelumnya.

Integrasi ketujuh dimensi strategis ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi pasar merupakan respon komprehensif terhadap kompleksitas permasalahan yang telah diidentifikasi dalam uraian pendahuluan. Pendekatan ini tidak hanya menjawab tantangan teknis infrastruktur, tetapi juga merespon kebutuhan untuk membangun konstruksi kinerja yang mengintegrasikan modernisasi infrastruktur dengan penguatan ekonomi lokal, sekaligus membangun model *governance* yang partisipatif dan berkelanjutan. Strategi implementasi ini mencerminkan pemahaman rumit tentang bagaimana program sktoral dapat berfungsi sebagai instrumen pembentukan legitimasi pemerintahan daerah dalam periode kritis 100 hari pertama, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Dengan demikian, konstruksi kinerja yang terbentuk tidak hanya efektif secara teknis dalam mengatasi permasalahan infrastruktur pasar, tetapi juga legitimasi secara politik dalam membangun kepercayaan publik dan keberlanjutan secara ekonomi dalam mendukung keberlangsungan usaha pedagang.

B. Konfigurasi Aktor dan Dinamika Koalisi dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan revitalisasi pasar dalam periode 100 hari pertama melibatkan konfigurasi aktor yang heterogen dengan kepentingan yang tidak selalu konvergen. Pemetaan aktor yang berperan dalam mendorong agenda kebijakan penataan Pasar Minggu mengungkapkan kompleksitas relasi antar stakeholder yang memerlukan pendekatan manajemen yang *sophisticated*.

Adapun kasus di Pasar Minggu, setidaknya terdapat enam kelompok aktor yang dapat dipetakan berdasarkan peran dan posisi mereka, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

Sebagai motor utama kebijakan, Pemerintah Kota Bengkulu melalui UPTD Pasar Minggu bertindak sebagai pelaksana lapangan, sekaligus sebagai pengawas dalam memastikan jalannya program di lapangan. Pemerintah daerah dalam hal ini bertanggungjawab atas pembangunan infrastruktur, penyusunan regulasi teknis, dan pengawasan kegiatan di lapangan. Namun, tantangan besar yang

dihadapi ketika program ini dijalankan adalah resistensi dari kelompok yang sebagian besar PKL.

2. APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia)
APKLI menjadi representasi kepentingan PKL di tingkat organisasi secara institusional. Organisasi ini yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan PKL. APKLI menyampaikan aspirasi, keluhan, hingga menawarkan solusi agar kebijakan relokasi berjalan dengan pendekatan partisipatif. APKLI tidak selamanya bertentangan dengan kebijakan pemerintah, hal ini seperti disampaikan oleh Ketua APKLI Bengkulu, Muhar Rozi yang mengapresiasi penataan PKL di kawasan panorama Bengkulu, “Saya sangat mengapresiasi pengelola Pasar Panorama yang berhasil mengubah pasar yang dulunya semrawut menjadi tertata rapi. Kini, arus lalu lintas di sekitar pasar melaju lancar, karena para pedagang tidak lagi menutupi badan jalan” (Padmin, 2024).
3. PKL
Sebagai pihak yang berdampak langsung, PKL memiliki posisi strategis namun juga kompleks. PKL merupakan kelompok rentan yang ditempatkan sebagai subyek penataan, namun di sisi lain mereka memiliki kepentingan ekonomi yang tinggi. Dalam kasus penataan di Pasar Minggu, PKL menunjukkan sikap penolakan terhadap program relokasi karena berbagai alasan praktis dan ekonomi, seperti:
 - a. Kekhawatiran ekonomi, karena ditakutkan dalam penurunan pendapatan akibat relokasi. Alasan logisnya adalah khawatir kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan pendapatan, jika harus berjualan di dalam pasar; dan
 - b. Preferensi lokasi, karena menurut PKL, berjualan di dalam pasar tidak terlalu efektif bagi mereka, mengingat kurangnya minat pembeli yang lebih memilih untuk berbelanja di luar area pasar yang lebih terbuka dan mudah diakses. Kondisi ini menciptakan dilema bagi PKL, antara mematuhi aturan atau mempertahankan kelangsungan usaha mereka;
4. Pedagang Pemilik Kios
Kelompok ini adalah pedagang resmi di pasar karena mereka memiliki kios atau los di dalam pasar, mereka ini adalah kelompok yang sangat mendukung penertiban PKL, karena persaingan di dalam berdagang. Namun, tidak semua dari mereka berpandangan sama dengan keberadaan PKL sebagai pesaing.
5. Pihak Swasta
Pengelola PTM (Pasar Tradisional Modern) merupakan mitra pemerintah yang menyediakan lokasi berdagang, di dalam pasar. Adapun keberadaan swasta ini sangat vital dalam penyediaan fasilitas fisik pasar secara modern.
6. Aktor Lainnya (Non-formal)
Kelompok-kelompok yang terkait dengan keberadaan pasar, seperti preman pasar, tukang parkir liar, dan lainnya yang dalam hal ini berseberang pandangan dengan agenda pemerintah serta memiliki pengaruh tersendiri. Mereka sering dikaitkan dengan kelompok penghambat pelaksanaan program. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa kebijakan penataan tidak hanya bersinggungan dengan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga keamanan dan politik.
7. LSM (P3MB)

Adapun keberadaan LSM memiliki agenda tersendiri, yang dalam kasus di Pasar Minggu mereka menamakan dirinya sebagai Perkumpulan Pedagang Pasar Minggu Bengkulu atau disingkat dengan P3MB, mereka sangat intens meminta agar Pemerintah Kota Bengkulu bertindak secara proposional dalam melaksanakan program penataan pasar tradisional, dengan tetap mengedepankan asas, norma dan kaidah hukum yang berlaku. Bagi P3MB program penataan PKL diindikasikan adanya kepentingan yang tidak transparan, karena mereka tidak pernah dilibatkan untuk melakukan dialog. P3MB telah mengirimkan 28 surat kepada pemerintah dengan permintaan agar pasar dapat kembali difungsikan seperti sediakala dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional.

Merujuk tulisan (Herazo & Lizarralde, 2016) dalam artikelnya berjudul “*Understanding stakeholders’ approaches to sustainability in building projects*”, yang menunjukkan bahwa *Mendelow’s Power-Interest Matrix* (1991) sebagai salah satu kerangka fundamental yang diadopsi dan dikembangkan oleh berbagai peneliti untuk memahami dinamika stakeholder dalam proyek pembangunan berkelanjutan. Berkaca dari peran dan posisi aktor di Pasar Minggu dengan menggunakan *Mendelow’s Power-Interest Matrix*, dapat digambarkan bahwa model ini mengkategorikan stakeholder berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan para aktor terhadap kebijakan penataan PKL di Pasar Minggu. Sehingga memungkinkan identifikasi strategi manajemen stakeholder yang tepat berdasarkan posisi dalam matriks kekuasaan-kepentingan berikut.

Gambar 2. *Mendelow’s Power-Interest Matrix* dalam Identifikasi Aktor di Pasar Minggu



Model *mendelow's matrix* memberikan kategorisasi strategis yang menempatkan pemerintah daerah dan PKL dalam kuadran “*manage closely*” karena keduanya memiliki kekuasaan dan kepentingan tinggi, meski dengan orientasi yang berlawanan. APKLI dan P3MB berada dalam posisi “*keep informed*” sebagai aktor dengan kepentingan tinggi namun kekuasaan terbatas, sementara pedagang pemilik kios dan pengelola PTM masuk kategori “*keep satisfied*” dengan kekuasaan tinggi namun kepentingan spesifik. Adapun aktor non-formal dalam kerangka ini, menempatkannya sebagai “*monitor*” atau stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi, namun tidak memiliki kekuasaan formal, sehingga penting untuk dipantau dan sesekali diajak terlibat agar aspirasi mereka terakomodasi. Secara keseluruhan, *mendelow's Power-Interest Matrix* dalam mengidentifikasi peran dan posisi aktor di Pasar Minggu ini untuk membantu pemerintah kota selaku pemangku kebijakan dalam memprioritaskan upaya komunikasi dan keterlibatan dengan bermacam kelompok stakeholder sesuai karakteristik mereka. Dengan begitu, resiko konflik dapat diminimalkan dan akan mendapatkan dukungan maksimal yang lebih mudah didapatkan.

Selanjutnya, konfigurasi aktor ini menunjukkan bahwa konstruksi kinerja pemerintahan tidak dapat dibangun secara unilateral, melainkan memerlukan kemampuan untuk mengelola koalisi multi-stakeholder. Temuan ini sejalan dengan konseptualisasi (Sabatier & Mazmanian, 1980) tentang pentingnya dukungan koalisi dalam memerlukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan kemampuan untuk membangun konsensus minimal diantara aktor-aktor kunci, meskipun proses ini tidak berlangsung tanpa konflik dan negosiasi yang intensif.

Dinamika koalisi yang terbentuk juga mencerminkan strategi konstruksi kinerja yang mengutamakan legitimasi berbasis partisipasi. Dengan melibatkan berbagai kategori aktor dalam proses implementasi, pemerintahan membangun narasi tentang inklusivitas dan transparansi yang berkontribusi pada pembentukan persepsi publik tentang *good governance*.

C. Implikasi Bagi Legitimasi dan Keberlanjutan Program Pemerintahan Daerah

Implementasi kebijakan revitalisasi pasar dalam 100 hari pertama kerja pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi-Ronny PL. Tobing mencerminkan dinamika yang kompleks dalam membangun legitimasi pemerintahan daerah. Keberhasilan pencapaian target-target awal, khususnya dalam aspek teknis dan administratif, telah memberikan kontribusi penting dalam membentuk legitimasi berbasis kinerja (*performance based legitimacy*). Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya menunjukkan kemampuannya dalam merespon kebutuhan publik secara cepat, tetapi juga membuktikan kesungguhan dalam merealisasikan janji-janji kampanye. Legitimasi semacam ini memiliki kedekatan dengan konsep legitimasi legal-rasional sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber, di mana kepercayaan publik tumbuh seiring dengan konsistensi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya secara efektif, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang sah (Dwiputrianti, 2009; Weber et al., 1978). Artinya, performa

birokrasi menjadi alat ukur utama dalam menilai kredibilitas pemerintahan, terutama pada masa-masa awal kepemimpinan.

Namun demikian, keberhasilan jangka pendek tersebut juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi keberlanjutan pemerintahan. Ketika ekspektasi publik telah terbentuk berdasarkan capaian cepat, maka pemerintahan dituntut untuk mempertahankan atau bahkan melampaui performa tersebut pada periode-periode selanjutnya. Padahal, tidak semua kebijakan publik dapat diimplementasikan dalam kerangka waktu yang singkat, terlebih ketika menyangkut transformasi struktural yang memerlukan proses panjang dan sumber daya yang tidak sedikit. Ketimpangan antara pencapaian awal dan keberlanjutan program dapat berisiko menurunkan legitimasi apabila pemerintahan gagal memenuhi ekspektasi yang sudah terlanjur tinggi. Oleh karena itu, capaian awal perlu diposisikan sebagai pondasi untuk membangun keberlanjutan, bukan sebagai titik akhir dari performa pemerintahan.

Lebih lanjut, hasil temuan lapangan mengindikasikan bahwa dampak jangka panjang dari program revitalisasi pasar belum sepenuhnya dapat dinilai dalam waktu yang singkat. Meski revitalisasi berhasil memperbaiki fisik pasar dan memperkuat citra positif pemerintahan, transformasi ekonomi lokal sebagai tujuan akhir kebijakan masih memerlukan evaluasi yang berkelanjutan. Perbaikan infrastruktur semata tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan revitalisasi tanpa disertai pembaruan sistem manajemen pasar, penguatan kapasitas pelaku usaha, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam konteks ini, pembangunan keberlanjutan adanya integrasi antara intervensi teknis dan pendekatan sosial yang bersifat transformatif (Engkus, 2020).

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting bagi pengembangan model konstruksi kinerja pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian pendek, tetapi juga menasar dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Pertama, dibutuhkan perencanaan yang menyeimbangkan antara pencapaian cepat dan investasi strategis untuk mendorong transformasi sistemik. Perpaduan keduanya menjadi krusial dalam mempertahankan legitimasi, sekaligus mengarahkan kebijakan pada hasil yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Kedua, indikator keberhasilan perlu dikembangkan secara lebih holistik, mencakup bukan hanya aspek output seperti penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga outcome dan dampak riil seperti peningkatan kesejahteraan pedagang, pertumbuhan ekonomi lokal, dan perubahan persepsi masyarakat terhadap pasar tradisional.

Ketiga, dimensi partisipasi publik dan stakeholder perlu diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan, bukan sekedar instrumen untuk memperoleh legitimasi semata. Keterlibatan masyarakat yang otentik menuntut proses dialogis, waktu, dan sumber daya yang memadai, sehingga partisipasi tersebut dapat menghasilkan solusi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif. Hal ini sejalan dengan hasil studi yang menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan revitalisasi pasar (Indrawan et al., 2024).

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar pemerintahan daerah mengadopsi pendekatan *portfolio management* dalam mengelola program-program kebijakan. Dalam pendekatan ini, beberapa program dapat difokuskan untuk meraih pencapaian cepat sebagai penguat legitimasi, sementara program ini diarahkan pada perubahan

struktural yang lebih mendalam dan berjangka panjang. Dengan cara ini, pemerintahan tidak hanya mampu mempertahankan momentum legitimasi yang telah dibangun, tetapi juga menciptakan landasan yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal.

D. Dimensi Simbolik dan Komunikatif dalam Pembentukan Persepsi Publik

Konstruksi kinerja pemerintahan dalam implementasi revitalisasi pasar tidak dapat dipisahkan dari dimensi simbolik yang melekat pada program ini. Penetapan target 100 hari bukan hanya *timeline* implementasi, tetapi juga instrumen komunikasi politik yang menciptakan ekspektasi publik dan mengukur komitmen pemerintahan baru. Simbolisme “100 hari pertama” mengacu pada tradisi politik yang telah mengakar dalam sistem demokratis, dimana periode ini dianggap sebagai momentum kritis untuk membangun kredibilitas dan legitimasi pemerintahan (Hood & Dixon, 2015).

Narasi “pasar yang bersih, nyaman dan modern” yang diusung dalam tagline program 100 hari pertama kerja Walikota-Wakil Walikota Bengkulu ini berfungsi identitas pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan modernisasi ekonomi lokal. *Framing* ini secara strategis menempatkan pemerintahan sebagai agen perubahan yang mampu mentransformasi wajah ekonomi tradisional tanpa menghilangkan esensi lokalitas. Strategi komunikasi ini menunjukkan pemahaman yang *sophisticated* tentang bagaimana membangun persepsi publik melalui kombinasi antara pencapaian substansial dan presentasi yang efektif.

Setiap tahapan perbaikan infrastruktur pasar didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada publik melalui berbagai saluran media. Strategi ini penting dan berfungsi sebagai bentuk transparansi, sehingga dapat membentuk persepsi tentang kinerja pemerintahan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Pendekatan saluran komunikasi yang digunakan petugas UPTD Pasar Panorama adalah menyebarkan surat pemberitahuan secara langsung kepada para pedagang. Meskipun bersifat resmi dan terdokumentasi, metode ini sangat terbatas dari sisi jangkauan, karena surat tersebut tidak disertai dengan penjelasan lisan dan tidak dilakukan melalui pertemuan kelompok. Dalam konteks komunikasi publik, penggunaan media cetak berupa penyebaran surat pemberitahuan tanpa diiringi dialog merupakan pendekatan yang kurang responsif terhadap kondisi masyarakat dengan beragam tingkat literasi.

Selain penyebaran surat pemberitahuan, petugas UPTD Pasar juga mendatangi langsung ke lapak-lapak. Namun intensitas komunikasi seperti ini tidak dapat merata, sehingga menimbulkan kesan tidak efektif. Adapun pemanfaatan komunikasi digital, seperti medsos atau web resmi pemerintah tidak dimanfaatkan secara optimal. Asumsinya, platform digital dapat menjadi medium efektif untuk menjangkau khalayak luas secara cepat dan interaktif. Termasuk minimnya alat peraga visual di sekitar pasar mengenai penataan pasar, juga tidak dilakukan, sehingga komunikasi ini terbatas dan tidak menyentuh secara keseluruhan.

Adapun informasi mengenai revitalisasi pasar di Pasar Barukoto I dan II menurut informan penelitian juga tidak di terima secara langsung, sebagian mengaku mengetahui rencana revitalisasi pasar dari saluran informal, seperti kabar dari sesama

pedagang atau medsos. Informan lainnya menyatakan bahwa mengetahui akan dilakukannya revitalisasi pasar karena melihat dari pihak terkait sedang melakukan survei lokasi, yang mengabarkan akan melakukan proses revitalisasi pasar, yang mana program ini adalah bagian dari program 100 hari kerja pertama Walikota dan Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi-Ronny PL. Tobing.

Berkaca dengan kasus di Pasar Barukoto I dan II terkait ketiadaan sosialisasi formal dan minimnya partisipasi aktif dari para pedagang, memperlihatkan bagaimana pemerintah dalam konteks program revitalisasi ini masih mengarah pada model implementasi *top-down*. Sedangkan dari sisi persepsi pedagang terhadap program revitalisasi, sebagian besar informan mengaku mendukung rencana revitalisasi pasar, apabila pelaksanaannya benar-benar memihak pada kebutuhan pedagang. Mereka menyadari bahwa kondisi pasar saat ini sangat memprihatinkan-atap bocor, genangan air ketika musim hujan datang yang diakibatkan dengan mampetnya saluran air pembuangan, serta banyaknya tumpukan sampah yang tidak terurus. Sehingga pedagang dalam satu titik, meyakini bahwa perbaikan infrastruktur akan menjadikan pasar lebih layak, karena bersih dan nyaman. Harapan dari para pedagang ini, memperlihatkan keterbukaan para pedagang atas pembangunan yang dilakukan pemerintah, dengan catatan proses kegiatan dari program pemerintah ini inklusif, partisipatif, adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang selama ini menggantungkan hidupnya di pasar.

Berangkat dari penjelasan diatas, diketahui bahwa dimensi partisipatif dalam implementasi program menjadi bagian dari strategi komunikatif yang lebih luas. Dengan melibatkan pedagang dalam proses dialog dan konsultasi, pemerintahan membangun narasi tentang demokratisasi kebijakan publik. Pendekatan ini berkontribusi pada pembentukan persepsi bahwa pemerintahan tidak hanya efektif dalam mencapai target, tetapi juga inklusif dalam proses pengambilan keputusan.

E. Kompleksitas dan Kontradiksi dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar

Implementasi kebijakan revitalisasi pasar dalam kerangka waktu 100 hari kerja pertama Walikota dan Wakil Walikota, Dedy Wahyudi-Ronny PL. Tobing menghadapi berbagai kompleksitas yang mencerminkan ketegangan antara ekspektasi politik dan realitas implementasi. Target waktu yang relatif ketat menciptakan tekanan untuk mengutamakan aspek-aspek yang memerlukan proses lebih panjang cenderung tertunda atau diabaikan. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa revitalisasi pasar yang efektif memerlukan integrasi antara modernisasi fisik dan non-fisik (Ranjani et al., 2018).

Hasil wawancara dengan pedagang pasar, baik pedagang yang memiliki kios maupun pedagang PKL, mengungkapkan persepsi yang beragam terhadap implementasi program revitalisasi di masa 100 hari pertama kerja Walikota dan Walikota Bengkulu. Sebagian pedagang menyambut positif atas perbaikan infrastruktur fisik yang langsung berdampak pada kenyamanan berdagang, namun sebagian lainnya masih mempertanyakan keberlanjutan program serta dampaknya terhadap stabilitas usaha mereka.

Salah satu fakta yang ditemui di lapangan, terkait penataan Pasar Minggu, disampaikan oleh Ketua P3MB bahwa program pemerintah terkait penataan PKL dari pemerintah sebelum-sebelumnya sampai pemerintahan baru ini, belum menemukan solusi konkrit. Hal ini diduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengambil keuntungan. Para pedagang merasa, kebijakan penataan ini seharusnya memperbaiki kondisi pasar, justru hal ini tersendat oleh kepentingan-kepentingan lain yang tidak berpihak kepada mereka. Pedagang berkeinginan untuk mengembalikan fungsi pasar dengan mengedepankan nilai-nilai tradisionalnya, dimana keseimbangan antara modernisasi dan keberlangsungan usaha dapat berjalan dengan baik.

Kondisi Pasar Minggu berbeda dengan pasar-pasar lainnya, karena adanya sejarah masa lalu, saat pendirian Mega Mall, yang mana sebelumnya di tahun 2004 telah dibangun PTM yang berada satu kompleks dengan Mega Mall. Bentrokan antar pedagang dengan pihak manajemen Mega Mall terjadi pada tahun 2007, karena pedagang merasa tersingkirkan, baik lahan usaha maupun persaingan dagang yang ada. Pemerintah hingga kini belum melakukan pendekatan langsung kepada pedagang, karena bagi mereka menegakkan peraturan daerah-seharusnya diiringi dengan solusi yang konkrit. Mereka berharap dapat diajak duduk bersama, dengan melakukan komunikasi terbuka, sehingga Pasar Minggu tetap menjadi pusat ekonomi ditengah-tengah Kota Bengkulu.

Tantangan koordinasi antar stakeholder merupakan kompleksitas di dalam implementasi, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif. Perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat pengguna pasar memerlukan proses negoisasi yang intensif dan berkelanjutan. Proses ini tidak selalu kompatibel dengan target waktu yang ketat, sehingga menciptakan tekanan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak optimal dari perspektif partisipasi stakeholder.

PENUTUP

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan fundamental tentang bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional dalam periode 100 hari pertama berfungsi sebagai instrumen konstruksi kinerja pemerintahan daerah di Kota Bengkulu. Pertanyaan pertama ini kemudian dirinci menjadi tiga dimensi operasional, yang mengkaji strategi implementasi kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan teknis dan simbolik, konfigurasi aktor dan dinamika koalisi multi-stakeholder dalam proses konstruksi kinerja, serta implikasi konstruksi kinerja terhadap legitimasi dan keberlanjutan program pemerintahan daerah.

Berdasarkan analisis terhadap implementasi program revitalisasi empat pasar utama, yaitu Pasar Panorama, Pasar Minggu, Pasar Barukoto I, dan Pasar Barukoto II, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi kinerja pemerintahan baru Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi-Ronny PL. Tobing, terwujud melalui integrasi kompleks antara dimensi teknis, simbolik dan komunikatif. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian pertama dengan menunjukkan bahwa strategi implementasi tidak terbatas pada pendekatan teknokratis semata, melainkan mencakup tujuh dimensi yang saling berkaitan. Dimensi politik-komunikatif yang menekankan dialog persuasif dengan pedagang, khususnya Pedagang Kaki Lima,

mencerminkan upaya pemerintahan untuk membangun legitimasi melalui proses yang partisipatif. Dimensi teknis-operasional yang fokus pada perbaikan infrastruktur dasar seperti sistem drainase, penataan area parkir, dan renovasi fasilitas, merespon langsung kondisi empiris pasar yang mengalami kerusakan sebagaimana telah diidentifikasi dalam penelitian ini.

Menjawab pertanyaan penelitian kedua, konfigurasi aktor dan dinamika koalisi multi-stakeholder mengungkap kompleksitas yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif konvensional. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tujuh kategori aktor utama dengan kepentingan yang heterogen dan tidak selalu konvergen. Analisis menggunakan *Mendelow's Power-Interest Matrix* untuk mengidentifikasi aktor di Pasar Minggu, yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintahan untuk mengelola koalisi yang melibatkan Pemerintah Daerah dan PKL dalam kuadran “*manage closely*”, APKLI dan P3MB dalam posisi “*keep informed*”, serta pedagang pemilik kios dan pengelola PTM (swasta) dalam kategori “*keep satisfied*”. Dinamika ini membuktikan bahwa konstruksi kinerja pemerintahan tidak dapat dibangun secara unilateral, melainkan memerlukan kemampuan sofistikasi (luar biasa) dalam mengelola berbagai kepentingan stakeholder yang kompleks.

Terhadap pertanyaan penelitian ketiga mengenai implikasi konstruksi kinerja bagi legitimasi dan keberlanjutan program, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pencapaian target-target awal telah memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk legitimasi berbasis kinerja yang sejalan dengan konsep legitimasi legal-rasional Weber. Pemerintahan berhasil menunjukkan kemampuannya dalam merespon kebutuhan publik secara cepat dan membuktikan kesungguhan dalam merealisasikan janji kampanye “Penataan dan Pembangunan Pasar yang Bersih, Nyaman dan Modern”. Namun demikian, keberhasilan jangka pendek ini juga menciptakan tantangan keberlanjutan dimana ekspektasi publik yang telah terbentuk menuntut pemerintahan untuk mempertahankan atau melampaui performa tersebut pada periode selanjutnya.

Dimensi simbolik dan komunikatif dalam pembentukan persepsi publik memainkan peran sentral dalam menjawab pertanyaan utama penelitian tentang fungsi program revitalisasi sebagai instrumen konstruksi kinerja. Penetapan target 100 hari bukan sekedar *timeline* implementasi, tetapi instrumen komunikasi politik yang menciptakan ekspektasi publik dan mengukur komitmen pemerintahan baru. Narasi “pasar yang bersih, nyaman dan modern”, berfungsi sebagai *framing* yang menempatkan pemerintahan sebagai agen perubahan yang mampu mentransformasi wajah ekonomi tradisional tanpa menghilangkan esensi lokalitas. Strategi ini secara langsung merespon kondisi empiris yang telah diuraikan dalam pendahuluan, dimana pasar-pasar tradisional di Kota Bengkulu menghadapi berbagai permasalahan infrastruktur yang memerlukan penanganan segera.

Kompleksitas dan kontradiksi dalam implementasi kebijakan mencerminkan ketegangan antara ekspektasi politik dan realitas lapangan yang menjadi tantangan dalam menjawab pertanyaan penelitian utama. Target waktu yang relatif ketat menciptakan tekanan untuk mengutamakan aspek-aspek yang *visible* dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sementara aspek-aspek yang memerlukan

proses transformasi lebih panjang cenderung tertunda. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa revitalisasi pasar yang efektif memerlukan integrasi antara modernisasi fisik dan non-fisik, namun dalam konteks periode 100 hari pertama, prioritas diberikan pada pencapaian yang dapat segera dikomunikasikan kepada publik sebagai bukti kinerja pemerintahan.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengintegrasikan teori konstruksi kinerja dalam administrasi publik dengan analisis implementasi kebijakan dalam konteks temporal kritis. Fenomena konstruksi kinerja yang dikonseptualisasikan oleh Hood tidak hanya melibatkan aspek teknis implementasi, tetapi juga dimensi simbolik dan komunikatif yang membentuk persepsi publik tentang efektivitas pemerintahan. Dalam konteks Kota Bengkulu, konstruksi kinerja termanifestasi melalui pemilihan program revitalisasi pasar sebagai prioritas utama, penetapan target waktu yang ambisius, dan strategi komunikasi yang menekankan aspek partisipatif dalam implementasi.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model konstruksi kinerja pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek tetapi juga berkelanjutan pada dampak jangka panjang. Pemerintahan daerah perlu mengadopsi pendekatan *portofolio management* dimana sebagian program difokuskan untuk meraih pencapaian cepat sebagai penguat legitimasi, sementara program lain diarahkan pada perubahan struktural yang lebih mendalam dan berjangka panjang. Peningkatan strategi komunikasi publik melalui pemanfaatan media digital dan forum dialog terstruktur menjadi krusial untuk memperkuat dimensi komunikatif dalam konstruksi kinerja.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus temporal yang terbatas pada periode 100 hari pertama, sehingga evaluasi dampak jangka panjang belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Konteks spesifik Kota Bengkulu juga membatasi generalisasi temuan pada daerah lain dengan karakteristik sosio-ekonomi dan politik yang berbeda. Agenda penelitian selanjutnya perlu mengembangkan studi longitudinal untuk mengukur keberlanjutan konstruksi kinerja dan dampaknya terhadap transformasi ekonomi lokal dalam jangka panjang.

Akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa periode 100 hari pertama pemerintahan daerah dapat berfungsi sebagai momentum strategis untuk membangun konstruksi kinerja yang efektif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintahan dalam mengintegrasikan dimensi teknis, simbolik, dan komunikatif secara holistik. Program revitalisasi pasar tradisional terbukti menjadi instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, mengingat visibilitasnya yang tinggi dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Konstruksi kinerja yang berhasil dibangun dalam periode kritis ini menjadi fondasi penting bagi legitimasi dan keberlanjutan pemerintahan daerah dalam menjalankan agenda pembangunan yang lebih luas.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kuasa-NYA sehingga penulisan artikel ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada mahasiswa Semester 6 Angkatan 2022, khususnya kelas A Jurusan Administrasi Publik

pada mata kuliah Metodologi Penelitian Administrasi, yang telah berkontribusi secara berkelompok dalam proses pengumpulan dan penggalan data selama penelitian lapangan. Kami juga berterima kasih kepada para peneliti dan penulis yang karyanya kami jadikan rujukan dan sumber dalam penelitian ini. Apresiasi setinggi-tingginya kami tujukan kepada *Editorial Team* Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempublikasikan artikel ini. Terakhir, terima kasih kami haturkan kepada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu atas dukungannya, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian artikel ini.

Pendanaan

Penulis dalam hal penelitian ini tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorsip*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia* (Cetakan Pe). Yayasan Obor Indonesia; KITLV-Leiden.
- Bevan, G., & Hood, C. (2006). What's Measured Is What Matters: Targets and Gaming in the English Public Health Care System. *Public Administration*, 84, 517–538. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2006.00600.x>
- BPS. (2022). *Jumlah dan Jenis Pasar Berdasarkan Klasifikasi Pasar di Kota Bengkulu*. BPS Provinsi Bengkulu. <https://bengkulu.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTQ2OSMx/banyaknya-desa-kelurahan-yang-memiliki-pasar-dan-banyaknya-pasar-menurut-kabupaten-kotamadya.html>
- Dwiputrianti, S. (2009). *Konsep Birokrasi Weber dan Praktik Birokrasi di Indonesia*. 1–6.
- Engkus. (2020). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 6(1), 9–16. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2388>
- Fahmy, I. A. (2022). Pengertian Administrasi Publik, Teori, Fungsi, dan Contohnya. In *Www.Pinhome.Id*.
- Herazo, B., & Lizarralde, G. (2016). Understanding stakeholders' approaches to sustainability in building projects. *Sustainable Cities and Society*, 26, 240–254. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.05.019>
- Herdianson. (2025). Dedy - Ronny Paparkan Visi - Misi 2025 - 2030, Program Pro Rakyat Terus Berlanjut. *Teropong Publik*. <https://www.teropongpublik.co.id/dedy-ronny-paparkan-visi-misi-2025-2030-program-pro-rakyat-terus-berlanjut>
- Hood, C. (2006). From polling station to political station? Politics and the shinkansen. *Japan Forum*, 18, 45–63. <https://doi.org/10.1080/09555800500498228>
- Hood, C., & Dixon, R. (2015). *A Government that Worked Better and Cost Less?: Evaluating Three Decades of Reform and Change in UK Central Government*. 1–256. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199687022.001.0001>
- Hutapea, E. B. T. (2020). *Komunikasi Politik-Lingkup kajian, konsep dan pendekatan* (Launa (ed.); Cetakan Pe). Gibson Books.
- Indrawan, N. K. R. A., Yuliantika, I. G. A. A., & Marsitadewi, K. E. (2024). Implementasi

- Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Untuk Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern (Studi Pada Pasar Ubud di Kabupaten Gianyar). *Jurnal Widya Publika*, 12(1), 1–6. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/648>
- Mayasari, A. (2025). Pemkot Bengkulu tata Pasar Minggu dan Pasar Panorama pada April 2025. *Antaranews*. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/404321/pemkot-bengkulu-tata-pasar-minggu-dan-pasar-panorama-pada-april-2025>
- Mietzner, M. (2020). Rival populisms and the democratic crisis in Indonesia: chauvinists, Islamists and technocrats. *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 420–438. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1725426>
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Novian, F., S. Olip, N., Fauzan, I., & GHazi, M. N. (2024). Isu Strategis Tantangan Pembangunan Infrastruktur Nasional dan Infrastruktur Daerah di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/jljp.v9i2.23541>
- Padmin. (2024). APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia) Bengkulu Apresiasi Pengelola Pasar Panorama Kota Bengkulu. *Poros Keadilan*. <https://poroskeadilan.com/2024/05/21/apkli-asosiasi-pedagang-kaki-lima-indonesia-bengkulu-apresiasi-pengelola-pasar-panorama-kota-bengkulu/>
- Poguntke, T., & Webb, P. (2005). The Presidentialization of Politics in Democratic Societies: A Framework for Analysis. In *The Presidentialization of Politics. A Comparative Study of Modern Democracies*. <https://doi.org/10.1093/0199252017.003.0001>
- Ranjani, R., Ayu S, L., & Nurhikmah, M. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus di BSD Serpong dan Pasar Manis Purwokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1). <https://doi.org/10.31506/jap.v9i1.4735>
- Rohmadani, S., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Nambangan Di Kota Surabaya. *Publika*, 9, 297–308. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p297-308>
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). *The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Saputra, M. K. (2025). Pemkot Percepat Rehab Barukoto, Ini Pernyataan Wakil Wali Kota Bengkulu. *Harian Bengkulu Ekspres*. <https://harianbengkuluexpress.bacakorana.co/read/31018/pemkot-percepat-rehab-barukoto-ini-pernyataan-wakil-wali-kota-bengkulu>
- Weber, M., Roth, G., & Wittich, C. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press. <https://books.google.co.id/books?id=pSdaNulaUUEC>

Tentang Penulis

Abdul Aziz Zulhakim, Suratman, Yorry Hardayani, dan Jatmiko Yogopriyatno adalah dosen pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Keempat orang penulis dalam hal ini memiliki keterkaitan pada area riset yang sama, yaitu seputar tema administrasi publik dan kebijakan publik.